

**PRAKTIK TRANSAKSI *TA'ĀWUN* PADA TRADISI *ATATOLONG*
MASYARAKAT SUMENEP MADURA**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Studi Islam



Oleh:

Ilham Wahyudi
NIM. F53416013

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya:

Nama : Ilham Wahyudi

NIM : F53416013

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Pebruari 2020

Saya yang menyatakan,



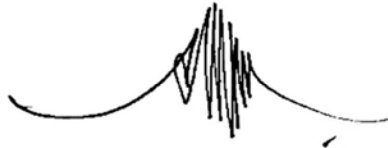
PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul “**Praktik Transaksi *Ta’āwun* Pada Tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura**” yang ditulis oleh ILHAM WAHYUDI ini telah disetujui untuk dilaksanakan UJIAN TERBUKA.

Surabaya, 8 Juni 2020

Oleh:

PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of vertical lines forming a central peak, with curved lines extending outwards to the left and right.

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A.

PROMOTOR

A handwritten signature in black ink, featuring a large, thick, horizontal stroke with several loops and a long tail extending to the right.

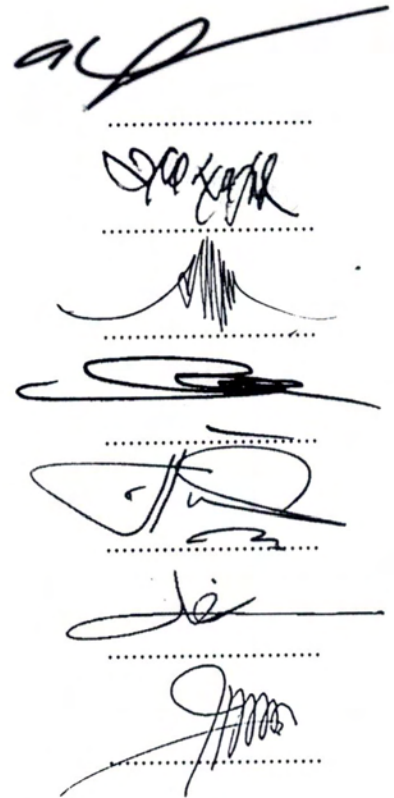
Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A.

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA

Disertasi berjudul “Praktik Transaksi *Ta’āwun* pada Tradisi *Atatolong* Masyarakat Sumenep Madura” yang ditulis oleh ILHAM WAHYUDI ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 29 Juni 2020

Tim Penguji:

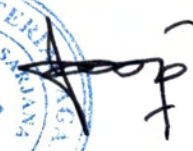
1. Dr. Ahmad Nur Fuad, MA.
2. Dr. H. Hammis Syafaq, M. Fil.I
3. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A.
4. Dr. H Ahmad Imam Mawardi, M.A.
5. Prof. Dr. H. M. Noor Harisuddin, M. Fil.I.
6. Prof. Dr. H. Imam Ghazali Said, MA.
7. Dr. H. M. Syamsul Huda, M. Fil.I.



Surabaya, 30 Juli 2020

Direktur,
pascasarjana




Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.
NIP. 196004121994031001.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilham Wahyudi
NIM : F53416013
Fakultas/Jurusan : PASCASARJANA/S3 STUDI ISLAM/DIRASAH ISLAMİYAH
E-mail address : ilhamjember@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PRAKTIK TRANSAKSI TA 'ĀWUN PADA TRADISI ATATOLONG
MASYARAKAT SUMENEP MADURA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Nopember 2021

Penulis

(ILHAM WAHYUDI)

peran sentral makna di dalam pengalaman manusia (*meaning in experience*). Fenomenologi tidak mengambil langkah observasi ataupun generalisasi di dalam Penelitian tentang manusia, seperti yang lazim ditemukan pada psikologi positivistik.

Cita-cita Husserl adalah mengembangkan fenomenologi sebagai suatu disiplin ilmiah yang lengkap dengan metode yang jelas dan akurat. Di dalam ilmu-ilmu alam, seperti kimia, fisika, dan biologi, kita mengenal adalah metode Penelitian ilmu-ilmu alam yang sifatnya empiris dan eksperimental. Inti metode Penelitian ilmu-ilmu alam adalah melakukan observasi yang sifatnya sistematis, dan kemudian menganalisisnya dengan suatu kerangka teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Husserl ingin melepaskan diri dari cara berpikir yang melandasi metode Penelitian semacam itu. Baginya untuk memahami manusia, fenomenologi hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni dari orang yang mengalaminya.

Di dalam kerangka berpikir ini, seorang ilmuwan sekaligus adalah sekaligus peneliti dan yang diteliti. Ia adalah subyek sekaligus obyek dari Penelitian. Dan seperti sudah ditegaskan sebelumnya, fenomenologi adalah cara untuk memahami kesadaran manusia dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Namun menurut Penelitian Smith, Husserl membedakan tingkat-tingkat kesadaran (*state of consciousness*). Yang menjadi fokus fenomenologi bukanlah pengalaman partikular, melainkan struktur dari pengalaman kesadaran, yakni realitas obyektif yang mewujudkan

obyek. Hal yang sama berlaku untuk kesadaran. Intensionalitas adalah keterarahan kesadaran (*directedness of consciousness*). Dan intensionalitas juga merupakan keterarahan tindakan, yakni tindakan yang bertujuan pada satu obyek.

Namun Husserl juga melihat beberapa pengalaman konkret manusia yang tidak mengandaikan intensionalitas, seperti ketika anda merasa mual ataupun pusing. Kedua pengalaman itu bukanlah pengalaman tentang suatu obyek yang konkret. Namun pengalaman itu sangatlah jarang, kecuali anda yang menderita penyakit tertentu. Mayoritas pengalaman manusia memiliki struktur. Mayoritas pengalaman manusia melibatkan kesadaran, dan kesadaran selalu merupakan kesadaran atas sesuatu. Husserl menyebut setiap proses kesadaran yang terarah pada sesuatu ini sebagai tindakan (*act*). Dan setiap tindakan manusia selalu berada di dalam kerangka kebiasaan (*habits*), termasuk di dalamnya gerak tubuh dan cara berpikir.

Fenomenologi adalah analisis atas esensi kesadaran sebagaimana dihayati dan dialami oleh manusia, dan dilihat dengan menggunakan sudut pandang orang pertama. Fenomenologi menganalisis struktur dari persepsi, imajinasi, penilaian, emosi, evaluasi, dan pengalaman orang lain yang terarah pada sesuatu obyek di luar. Dengan demikian menurut Smith, fenomenologi Husserl adalah suatu penyelidikan terhadap relasi antara kesadaran dengan obyek di dunia luar, serta apa makna dari relasi itu. Konsep bahwa kesadaran

hasil Penelitiannya adalah masyarakat urban Madura di Surabaya memahami *oto'-oto'* sebagai warisan budaya leluhur yang mampu menjembatani pewarisan tradisi dari generasi kegenerasi berikutnya dan sebagai sarana untuk mengikatkan diri dengan sesama kelompok etnis. Tradisi *oto'-oto'* diselenggarakan dihari-hari dan bulan yang telah ditentukan. Penyelenggaraan *oto'-oto'* dilaksanakan secara sederhana, fleksibel waktu atau jamnya, tidak ada panggung hiburan, kecuali dalam acara *sandur* dan tidak ada lagi kelompok *blater* sebagai bagian yang tidak terpisahkan seperti acara *oto'-oto'* yang diselenggarakan di tanah Madura. Esensi pokok, acara *oto'-oto'* adalah pembayaran uang kepada pihak yang *lungguh*, diserahkan melalui ketua kelompoknya masing-masing, atau melalui tukang jalan (*ajelen*), dicatat secara terperinci oleh Juru Tulis dalam administrasi Buku Agung. Tradisi *oto'-oto'* terbukti tidak hanya mampu mengintegrasikan antar anggota kelompok, namun lebih luas lagi sebagai wahana, forum silaturahmi dalam meningkatkan solidaritas sosial antar etnis, dan mampu mengintegrasikan masyarakat Madura yang tersebar di seluruh pelosok Surabaya.⁴⁹ Terdapat kesamaan dalam solidaritas social dengan saling membantu dan tolong menolong, akan tetapi juga terdapat perbedaan dalam format undangan seperti halnya *ompangan*, memakai undangan biasa, sedangkan *atatolong* disetiap undangan biasanya disertai rokok surya 12.

⁴⁹ Fatekhul Mujib, Eko Ariwidodo, dan Mushollin, "Tradisi Oto'-Oto'; Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura Di Surabaya," *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, IAIN Madura*, Vol 12, No. 1 (Desember, 2015), 21.

berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan **hanafiyah**.

Malikiyyah dan **Shafi'iyah**, menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw. pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini diqiaskan dengannya.

Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya.

Hanya saja, **Shafi'iyah** mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

usia baligh, usia mimpi dewasa, masa haid, nifas dan suci, ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ukuran yang dipandang sedikit dan banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan shalat, tentang ukuran sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan ketika berwudhu', dan ijab qabul, tentang tenggang waktu dalam pengembalian barang yang telah dibeli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh, dan tentang ukuran berat dan sukatan, yang semuanya belum dikenal pada masa Rasulullah saw. Semua itu menurut pendapat yang kuat berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.

Adapun '*urf*' yang rusak, maka tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan dalil shariat. Apabila manusia telah saling mengerti akad diantara akad-akad yang rusak seperti akad riba dan akad gharar, maka bagi '*urf*' tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Akan tetapi dalam contoh akad ini ditinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad ini apakah dianggap termasuk darurat atau kebutuhan, artinya apabila akad tersebut membatalkan berarti menipu peraturan kehidupan manusia atau mereka akan memperoleh kesulitan atau tidak. Maka jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka hal itu diperbolehkan, karena darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan kebutuhan itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi batal berdasarkan '*urf*' tidak diakui.

Islam masuk dan berkembang di Madura termasuk Sumenep, sebagaimana juga di Jawa melalui transformasi kultural yang dilakukan oleh para penyebar Islam. Dengan demikian, Islam yang ada dan berkembang di Sumenep adalah Islam kultural, yang berbasis pada tradisi masyarakat. Tradisi-tradisi tersebut tetap lestari hingga kini. Hal ini memungkinkan lantaran pola keberagamaan yang dianut oleh masyarakat Sumenep berbasiskan pada nilai-nilai tradisi.

4. Religiositas Masyarakat Sumenep

Masyarakat Sumenep lebih mengutamakan keagamaan dan kebudayaan nenek moyang. Sebagian besar masyarakat masih mengutamakan religiositas dibandingkan pendidikan umum. Masyarakat madura biasanya hanya sekolah hingga Sekolah Dasar kemudian melanjutkan ke pondok pesantren.

Pendidikan agama sejak kecil juga dilaksanakan dengan mengirim anak-anak mengaji ke langgar atau mushalla terdekat. Guru mengaji memiliki andil dan peran sangat besar dalam pewarisan nilai-nilai ajaran Islam. Ketika menginjak dewasa, masyarakat mengirim anak-anak mereka ke pesantren terdekat atau luar Sumenep untuk belajar memperdalam ilmu agama.

Pendalaman ilmu agama dan menjalin solidaritas dilakukan dengan menghadiri pengajian-pengajian umum yang diadakan oleh warga setempat atau dari luar daerah. Selain itu, pembacaan yasin dan tahlil yang diadakan biasanya setiap malam jumat untuk jamaah laki-laki dan malam lainnya untuk jamaah perempuan. Pada saat itu juga menjadi momentum untuk saling tolong menolong kepada tetangga masyarakat yang terkena musibah. Dan puncak religiositas adalah ketika sudah menunaikan ibadah haji, seseorang menjadi meningkat status

495.099 jiwa laki-laki dan 546.816 jiwa perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten Sumenep masih bertumpu di Kecamatan Kota Sumenep yaitu sebanyak 70.794 jiwa (6.75 %), diikuti Kecamatan Pragaan 65.031 jiwa (5.90 %) dan Kecamatan Arjasa sebanyak 59.701 jiwa (5,73%). Sedangkan Batuan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Dengan luas wilayah Kabupaten Sumenep sekitar 2.093,47 km² yang didiami oleh 1.0491.915 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep adalah sebanyak 498 jiwa/km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Kota Sumenep yakni 2.543 jiwa/km², dan yang paling rendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan batuan yakni 446 jiwa/ km².

Sex ratio penduduk Kabupaten Sumenep berdsarkan SP 2010 adalah sebesar 90,54 yang artinya jumlah penduduk laki2 adalah 9,46 % lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumenep selama 10 tahun terakhir, yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 0,55%. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Sapeken adalah yang tertinggi dibandingkan kecamatan lain di kabupaten sumenep yakni sebesar 1,60%, dan yang terendah adalah kecamatan Talango sebesar -0,36%.

Jumlah Rumah Tangga berdasarkan hasil SP 2010 adalah 315.412 RT. Ini berarti bahwa banyaknya penduduk yang menempati satu rumah tangga dari hasil

2. Masa Kolonial

Menurut buku "Tjareta Naghara Songenep", Pemerintahan Kompeni atau VOC datang ke wilayah Sumenep pada kurun pemerintahan Raden Bugan (Kanjeng Pangeran Ario Yudanegara) yang memerintah pada tahun 1648 s.d. 1672, yang merupakan salah seorang sahabat dari Pangeran Trunojoyo. Setelah perjuangan Trunojoyo dapat dipatahkan oleh kompeni, maka Wilayah Pamekasan dan Sumenep kemudian takluk kepada kekuasaan Kompeni. Bahkan sepeninggal Kanjeng Tumenggung Ario Yudonegoro, Kompeni ikut campur menentukan tampuk pemerintahan di Sumenep.

Pada tahun 1704 Pangeran Cakraningrat meninggal, di Mataram terjadi peristiwa penandatanganan perjanjian antara Pangeran Puger dengan Kompeni, bahwa Kompeni mengakui kekuasaan Pangeran Puger yang saat itu sedang berselisih dengan Sunan Mas (Amangkurat III) atas Kesultanan Mataram di Plered. Sebaliknya Pangeran Puger berkewajiban menyerahkan sebagian dari tanah Jawa dan Madura bagian Timur kepada Kompeni. Dengan demikian untuk yang kedua kalinya Sumenep jatuh ke tangan Kompeni, hal tersebut terjadi dalam perjanjian antara Susunahan Kerajaan Mataram dengan Kompeni pada tanggal 5 Oktober 1705. Adapun pernyataan tersebut ialah:

"Paduka yang Mahamulia Susunahan dengan ini menyerahkan secara syah kepada Kompeni untuk melindungi daerah-daerah Sumenep dan Pamekasan.... secara yang sama seperti dilakukan oleh Bupati yang terdahulu waktu menyerahkan daerahnya kepada Kompeni...."(Resink, 1984: 252).

Pada saat perjanjian tersebut daerah Sumenep berada di bawah masa pemerintahan Panembahan Romo (Cokronegoro II).

Pada masa pemerintahan Kanjeng R. Tumenggung Ario Cokronegoro IV (1744-1749) terjadi pemberontakan yang dipimpin Ke' Lesap dari Bangkalan. Pada saat itu Ke Lesap menggalang kekuatan rakyat yang sudah membenci pemerintahan Kompeni. Ia berjuang dari Timur dengan cara menguasai Keraton Sumenep. Ke Lesap memerintah Sumenep hanya dalam waktu 1 tahun yaitu tahun 1749-1750. Pemerintahan berikutnya dipegang oleh Kanjeng R Ayu Rasmana Tirtonegoro (1750-1762) keturunan dari Kanjeng Pangeran Ario Yudanegara yang kemudian menikah dengan seorang ulama bernama Bendoro Saud. Dia kemudian oleh Kompeni dinobatkan sebagai Adipati Sumenep dengan gelarnya Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro.

Pengangkatan atau penobatan Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro oleh Kompeni Belanda sebagai adipati Sumenep terjadi pada kurun pemerintahan R. A Rasmana Tirtonegoro (1750-1762), ini berarti terjadi dualisme kepemimpinan pada masa itu. Sedangkan setelah tahun 1762, kepemimpinan Sumenep diteruskan oleh Raden Asiruddin (Panembahan Somala) putra Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro.

Raden Asirudin adalah Adipati Sumenep XXXI. Dia adalah putra Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro dan Kanjeng R. Ayu Rasmana Tirtonegoro, atas permintaan kedua orangtuanya, dia oleh Kompeni dikabulkan dan diangkat menjadi Adipati Sumenep menggantikan ayahnya. Dia memerintah pada tahun 1762-1811 dengan gelar Pangeran Natakusuma I kemudian berganti menjadi

Tumenggung Ario Notokusumo dan kemudian dikenal dengan sebutan Panembahan Somala dia juga dikenal dengan Sultan Sumenep I. Selain itu dia juga pendiri Keraton Sumenep, Masjid Jami' Sumenep dan Asta Tinggi. Selanjutnya setelah dia mangkat, yang menggantikannya adalah putranya yang bernama Kanjeng Pangeran Ario Kusumadiningrat namun setelah beberapa bulan menjadi Adipati kemudian dia dipindah ke Pasuruan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan sebagai penggantinya adalah Kanjeng R. Tumenggung Abdurraman Tirtadiningrat (*saudara Kanjeng Pangeran Ario Kusumadiningrat*) kemudian dinaikkan tahtanya menjadi Panembahan Natakusuma II dan selanjutnya dinaikkan lagi tahtanya menjadi Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I.

Sebutan sultan biasanya digunakan untuk gelar penguasa sebuah kesultanan. Maka sebutan Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I, ini menunjukkan bukti bahwa Sumenep pada masa itu berbentuk kesultanan. Sebutan sultan juga terjadi atau tersandang pada Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro, ini juga bukti bahwa Sumenep pada masa itu berbentuk kesultanan.

Selama Sumenep jatuh kedalam wilayah pemerintahan VOC sampai pemerintahan Kolonial Belanda, Wilayah Sumenep tidak diperintah secara langsung, dan hal ini tentunya berbeda dengan wilayah lainnya di wilayah Hindia Belanda, Para Penguasa Sumenep diberi kebebasan dalam memerintah wilayahnya namun tetap dalam ikatan-ikatan kontrak yang telah ditetapkan oleh Kolonial Kala itu. Selanjutnya pada tahun 1883, Pemerintah Hindia Belanda mulai menghapus sistem sebelumnya (*keswaprajaan*), Kerajaan-kerajaan di

Madura) di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar yang pernah berdiri di Pulau Jawa. Adipati pertama di Sumenep adalah Arya Wiraraja, dia memerintah pada tahun 1269 diangkat oleh Prabu Kertanegara Raja Singhasari. Pemerintahan kerajaan di Sumenep berakhir secara resmi pada tahun 1883 dengan diangkatnya Pangeran Pakunataningrat bergelar Kanjeng Pangeran Ario Mangkudiningrat sebagai Bupati Sumenep akibat dampak dihapuskannya sistem keswaprajaan di Sumenep oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu pula, wilayah kabupaten Sumenep di bawah pemerintahan langsung *Nederland Indische Regening*, sehingga Sumenep lebih dikenal dengan sebutan *regent*. Namun Perlu diketahui, dari tahun 1883-1929 para Bupati yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda tetap dari keturunan bangsaw..an dalem Keraton Sumenep.

D. Sosial, Budaya dan Agama

1. Sosial dan Budaya

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 4 suku bangsa yaitu: Madura, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari keempat suku bangsa tersebut 3 suku bangsa, yaitu: Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan, yaitu: Pulau Masalembu dan Pulau Sapeken. Dengan demikian lebih dekat dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan suku Madura merupakan mayoritas dan terdapat di wilayah daratan dan sebagian kecil di kepulauan.

Penduduk Kabupaten Sumenep mempunyai sifat terbuka dan bersemangat tinggi dalam melaksanakan pembangunan daerahnya. Mereka bersedia berkorban untuk kepentingan orang banyak dan mempunyai sikap toleransi yang tinggi, ulet dan bekerja keras. Mata pencaharian pokok masyarakat

Madura khususnya penduduk Kabupaten Sumenep adalah bertani atau masyarakat agraris. Pada umumnya penduduk Kabupaten Sumenep bersifat fanatis religius dan taat terhadap ajaran agama.

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Sumenep beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk tahun 2010, penganut Islam berjumlah 1.033.854 jiwa (98,11%), Kristen berjumlah 685 jiwa (0,33%), Katolik berjumlah 478 jiwa (0,27%), Buddha berjumlah 118 jiwa (0,03%), Hindu berjumlah 8 jiwa (0,01%), Kong Hu Cu berjumlah 5 jiwa (0,002%). Jumlah tempat peribadatan menurut agama di Kabupaten Sumenep: Masjid berjumlah 1.413, Langgar berjumlah 2.848, Mushola/Surau berjumlah 926, Gereja berjumlah 5 dan Pura/Kuil berjumlah 1.

Kehidupan beragama di Kabupaten sumenep, baik antar umat beragama, antar sesama agama dan umat beragama dengan sesama agama, demikian juga penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat terpelihara dengan baik, dapat hidup berdampingan, saling toleransi, saling bantu dan saling berupaya untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Bahasa

Bahasa yang digunakan di Kabupaten Sumenep adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, dan bahasa Madura sebagai bahasa sehari-hari. Selain itu beberapa daerah di Pulau Sapeken dan beberapa pulau kecil di sekitarnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Bajo, bahasa Mandar, bahasa Makasar dan beberapa bahasa daerah yang berasal dari Sulawesi. Untuk Pulau Kangean bahasa yang digunakan adalah bahasa Madura dialek Kangean.

3. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Sumenep telah berkembang sejak zaman Penjajahan Hindia Belanda, di wilayah ini pernah berdiri sekolah HIS (Hollandsch-Inlandsche School) tahun 1901an yang terletak di daerah Pajagalan. Selain itu Pada tanggal 31 Agustus 1931 di daerah ini juga pernah berdiri sekolah setara HIS yakni HIS Partikelir (PHIS) Sumekar Pangabru yang terletak di daerah Karemangan tak jauh dari sekolah HIS milik pemerintah Hindia Belanda. PHIS didirikan oleh Meneer Muhammad Saleh Werdisastro, putra dari budayawan dan sejarawan Madura, R. Musaid Werdisastro peneliti "*babad Songenep*". Saat ini, di Sumenep tercatat ada 70 Sekolah Menengah Atas baik Negeri Maupun Swasta dan Madrasah Aliyah serta 2 sekolah Menengah kejuruan. Selain pendidikan umum tsb, Pendidikan Pesantren juga hampir terdapat diseluruh penjuru Sumenep, beberapa pondok pesantren besar yang terkenal antara lain, PP. Annuqayyah Guluk-Guluk, PP. Al-Amien Prenduan, PP. Mathaliul Anwar Sumenep, PP Al-Karimiyah, PP At-Taufiqiyah Aengbaja Raja, dan lainnya.

Adapun perguruan tinggi di Sumenep diantaranya adalah Universitas Wiraraja, Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien (IDIA), Institut Ilmu KeIslaman Annuqayyah (INSTIKA) Guluk-Guluk, STKIP PGRI Sumenep, STIT Al Karimiyah Beraji, AKNS (Akademi Komunitas Negeri Sumenep), STIQNIS (Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam)

b. Sumber Daya Energi: Kabupaten Sumenep selain memiliki potensi kekayaan alam berupa bahan galian golongan C, juga memiliki bahan tambang strategis berupa golongan A yang terletak di Pulau Pagerungan Besar, Pulau Sepanjang Kecamatan Sapeken, Perairan Pulau Giligenting. Berdasarkan perjalanan waktu selain di tiga pulau tersebut masih ada beberapa tempat yang terindikasi mengandung gas dan minyak bumi. Di antaranya sekitar Pulau Masalembu, Perairan Kalianget, Perairan Pulau Raas dan Blok Kangean. Setidaknya ada 10 perusahaan operator Migas yang mengelola beberapa blok migas di wilayah ini.

c. Sumber Daya Air: Berdasarkan aspek geomorfologi, sumber daya air di Kabupaten Sumenep terbagi di 4 (empat) satuan wilayah: a). Daerah Dataran b). Daerah Perbukitan Bergelombang Halus c). Daerah Perbukitan Bergelombang Kasar d). Daerah Perbukitan yang Terpisah.

2. Pertanian

a. Komoditi Pangan. Berdasarkan data Tahun 2010 luas lahan sawah di Kabupaten Sumenep 23.852 Ha, terbagi menjadi 13.388 Ha (56,13 %) lahan sawah tadah hujan, 5.385 Ha (22,57 %) lahan berpengairan teknis, 1.959 Ha lahan semi teknis, 1.071 Ha lahan sederhana dan 2.049 Ha lahan memakai irigasi desa. Penggunaan lahan khususnya lahan bukan sawah meliputi pekarangan, tegal, perkebunan, ladang, huma, padang rumput, lahan sementara tidak diusahakan, hutan rakyat, hutan negara, rawa-rawa, tambak, kolam, dan lainnya. Tanaman pangan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu komoditas beras

dari tujuan dari pesta perkawinan itu sendiri. Para keluarga dan tetangga tidak dianggap cukup sebagai saksi dalam penobatan kedua mempelai sebagai pasangan suami isteri. Akan tetapi setiap orang yang kenal diundang untuk hadir dan menjadi saksi dalam pernikahannya. Apresiasi kebahagiaan tidak cukup dengan hanya memanjatkan rasa syukur dan shalawat, akan tetapi lantunan para biduan merupakan bagian dari wujud rasa bahagianya.

Melaksanakan pesta perkawinan memang perintah agama. Namun demikian, sudah menjadi budaya umum bahwa pesta perkawinan harus mewah, berada di gedung pertemuan dengan menyediakan makanan enak dan sebagainya. Hal ini tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sumenep. Tradisi pesta perkawinan merupakan suatu keharusan yang wajib diadakan walaupun mereka kurang mampu, akan tetapi mereka berusaha untuk memeriahkannya walaupun dengan biaya yang bernilai jutaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Awaluddin berikut ini;

Tapi sekarang pelaksanaan pesta perkawinan sudah tidak seperti dulu, telah mengalami modifikasi yang luar biasa bahkan hampir keluar dari tujuan dari pesta perkawinan itu sendiri. Para keluarga dan tetangga tidak cukup sebagai saksinya. Akan tetapi setiap orang yang kenal diundang untuk hadir dan menjadi saksi dalam pernikahannya. Apresiasi kebahagiaan tidak cukup dengan hanya memanjatkan rasa syukur dan shalawat, akan tetapi lantunan para biduan merupakan bagian dari wujud rasa bahagianya, sudah banyak melenceng. Melaksanakan pesta perkawinan memang perintah agama. Namun demikian, sudah menjadi budaya umum bahwa pesta perkawinan harus mewah, berada di gedung pertemuan dengan menyediakan makanan enak dan seterusnya. Hal ini tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di masyarakat Kabupaten Sumenep. Tradisi pesta perkawinan merupakan suatu keharusan yang wajib diadakan walaupun mereka kurang mampu, akan tetapi mereka berusaha untuk memeriahkannya

Selain itu, diantara tugas lainnya adalah memastikan kesiapan lokasi, waktu, pendanaan, undangan, menentukan penceramah, serta rangkaian isi acara. Setelah panitia terbentuk, lalu membuat rencana pendanaan. Sumber pendanaan ada dua, dana pribadi tuan rumah dan sumbangan dari masyarakat. Teknis sumbangan dari masyarakat diawali dengan menginventarisir nama-nama yang akan diundang, nama-nama tersebut terdiri dari sanak famili, kerabat dekat, relasi, teman, rekanan, serta masyarakat umum. Kemudian membuat undangan lalu mencantumkan nama yang sudah dilist dan menyertakan rokok Surya 12 (dua belas) di undangan. Orang yang menerima undangan secara tidak langsung menyanggupi dan 'harus' menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pelaksana lalu diserahkan kepada tuan rumah. Jumlah uang atau barang yang diserahkan tidak ditentukan besarnya menyesuaikan kemampuan dan ketersediaan dana dari penerima undangan.²²

Pada saat hampir acara pernikahan atau walimah, tetangga dan beberapa kerabat menyibukkan diri untuk mempersiapkan segala kebutuhan acara. Yang paling sibuk saat itu adalah kaum ibu, sebab merekalah yang menyiapkan segala bentuk makanan tradisional dan segala hidangan yang akan disajikan di acara. Demikian juga yang remaja, dibutuhkan tenaganya untuk menyiapkan sarana dan prasarana dan lainnya.

²² Tesis yang ditulis oleh AFFAN RIADI dengan judul *TRADISI OMPANGAN TENGA WALIMAH AL-URS PERSPEKTIF 'URF DAN MASHLAHAT AL-MURSALAH* (Studi Kasus di Desa Karduluk, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep) bahwa secara umum, perayaan acara pernikahan ada dua macam. Pertama, perayaan acara pernikahan yang terbilang besar, dan biasanya untuk perayaan yang seperti ini, tuan rumah menyebarkan undangan yang di sisipi rokok. Kedua, perayaan acara pernikahan bersifat dadakan dan kecil-kecilan (*jeng-onjeng eret*, Madura, Red).

kepentingan kerja di dalam organisasi profit dan profesional. Pada masyarakat kota hubungan solidaritas dan kekeluargaan biasanya lebih longgar.

Sementara itu, terkait penentuan konsumsi, mereka melibatkan kaum ibu. Ini menunjukkan bahwa posisi kaum ibu memiliki peran dan posisi yang strategis. Sebab, besaran kuantitas dan aneka ragam hidangan harus mendapat persetujuan dari kalangan kaum ibu (ibu rumah tangga). Kaum laki-laki tidak ambil peran banyak terkait isi, bentuk dan kemasan, besaran kuantitas dan aneka ragam hidangan. Kaum laki laki biasanya hanya membawa uang, kalau perempuan selain ikut membantu memasak di dapur, mereka membawa bahan makanan seperti beras untuk bahan baku di dapur.

Sehari sebelum pelaksanaan acara pernikahan, para *Pattean* mempersiapkan segala sesuatu guna kesuksesan perayaan acara pernikahan. Juga tuan rumah mengundang sanak famili, tetangga, dan para ustadz atau kyai untuk selamatan yang dirangkai dengan pembacaan solawat Nabi. Dan akad nikah terkadang dilaksanakan waktu ini, keesokan harinya, dan terkadang jauh sebelumnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Amir Burhan berikut ini;

Untuk konsumsi, kaum ibu yang dominan berperan. Karena kaum ibu memiliki peran dan posisi yang strategis. Besaran dan banyaknya hidangan harus mendapat persetujuan dari kalangan kaum ibu. Kalau laki-laki tidak ambil peran banyak terkait isi, bentuk dan kemasan, besaran kuantitas dan aneka ragam hidangan. Kaum laki laki biasanya hanya membawa duit, kalau perempuan beda, selain ikut membantu memasak di dapur, mereka membawa bahan makanan seperti beras dan bahan lainnya untuk keperluan di dapur. Pelaksanaan acara pernikahan kurang sehari, *Pattean* ini sudah siap siap. Apalagi tuan rumah itu mengundang sanak famili, tetangga, dan para ustadz atau kyai untuk selamatan biasanya sambil baca solawat Nabi. Dan akad

Pada hari pelaksanaan acara pernikahan, semua panitia siap dan siaga untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai yang telah ditentukan. Sound system menggema sejak pagi, sementara kaum perempuan sibuk menyiapkan segala bentuk hidangan untuk para tamu. Acara tampak semakin meriah dengan beberapa hiburan pra acara sambil menunggu tamu-tamu undangan.

Pada saat tamu sudah banyak yang datang, pembawa acara membuka acara sembari membacakan susunan acara pernikahan. Rangkaian acara biasanya dibuka dengan pembacaan surah al-fatihah, lalu dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian membaca sholawat Nabi, dilanjut dengan prosesi akad nikah, dimulai dengan khotbah nikah lalu akad nikah. Sebelum ditutup dengan doa, acara dilanjut dengan ceramah agama tentang hikmah nikah.

Di hari pelaksanaan acara pernikahan, sambil acara sedang berlangsung, setiap undangan yang hadir disambut oleh tuan rumah dan panitia, termasuk yang bertugas sebagai pencatat setiap *atatalog* yang dibawa oleh para tamu undangan.

Pencatatan tersebut dilakukan, karena walaupun terkesan pemberian, akan tetapi bersifat hutang-piutang yang suatu saat harus dikembalikan. Pencatatan tersebut dapat dibenarkan dalam sebuah tradisi, juga sejalan dengan ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk mencatat setiap adanya transaksi hutang-piutang. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Baqarah ayat 282:

termasuk tradisi *atolong* dalam acara pernikahan, tradisi tersebut secara turun temurun dilestarikan dan dengan berbagai pengalaman yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat terkait tradisi tersebut. Bahkan uniknya lagi adalah, meskipun tidak mendapatkan undangan, tapi sudah terdengar bunyi *sound system* dan terlihat janur kuning melengkung, dengan sendirinya masyarakat datang untuk membantu dan memberi sumbangan dan ada pula yang mengembalikan hutang *atolong*.

Atolong sangat membantu dalam pendanaan dan pengadaan barang dalam acara pernikahan, bahkan sesuatu yang pada awalnya terasa berat dan sulit, dengan tradisi ini acara resepsi pernikahan akan menjadi ringan dan mudah. Walaupun disisi lain orang yang punya hutang *atolong* terkadang harus kerja keras untuk mengembalikan hutang ketika sudah jatuh tempo. Karena terkadang dalam satu hari ada 2 (dua) sampai 5 (lima) acara yang harus dihadiri dan yang harus kembalikan hutang *atolong*. Akan tetapi karena menjadi tradisi yang sudah mengakar di masyarakat sehingga wajib mengembalikan setiap yang sudah diterima sebelumnya meskipun harus mencari hutangan atau pinjaman. Dan kalau tidak bisa mengembalikan, akan kena sanksi sosial dari masyarakat. Memang masyarakat yang hendak menyelenggarakan acara pernikahan seharusnya sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Fathul Munir berikut ini;

Sebenarnya tradisi ini sangat membantu dalam pendanaan acara pernikahan, bahkan sesuatu yang pada awalnya terasa berat dan sulit, dengan tradisi ini acara resepsi pernikahan akan menjadi ringan dan mudah. Walaupun jangan lupa disisi lain orang yang

rasa kemanusiaan untuk meringankan beban orang lain khususnya yang akan melaksanakan resepsi pernikahan putra-putrinya.

Dalam tradisi *atolong* bermacam-macam yaitu: *pertama*, jumlah besaran dana dan bantuan yang diberikan. *Kedua*, penetapan waktu pelaksanaan dan siapa saja orang yang akan dilibatkan. Dan *ketiga*, cara memberikan *atolong*.

Pertama, dari hasil beberapa wawancara dan pengamatan di lapangan terkait dengan jumlah besaran bantuan yang diberikan kepada pihak yang akan melaksanakan perayaan nikah jumlah besaran bantuan itu bermacam-macam dari pemberian beras *sagentang* (madura) atau 3 (tiga) liter beras, *dua gentang* atau 6 (enam) liter, sampai ada besarnya 1 (satu) kwintal beras. Ada pula yang berbentuk gula. Sedangkan dalam bentuk uang mulai dari Rp. 25.000, Rp. 50.000, sampai ada yang di atas nominal Rp. 1.000.000,-.

Kedua, penetapan waktu undangan perayaan nikah juga tidak terlepas dari jumlah bantuan yang diberikan. Selain itu kedekatan hubungan dengan pihak tuan rumah menjadi prioritas diundang.

Ketiga, Dalam pelaksanaan pemberian bantuan dalam perayaan nikah itu secara umum diberikan secara individu. Akan tetapi demi kekompakan sudah ada beberapa kelompok yang mengkoordinir pelaksanaan pemberian sumbangan.⁶³

⁶³ Seperti di daerah Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep yang banyak persatuan atau kelompok bantuan. Sedangkan desa yang lain masih dilaksanakan secara individual.

Dalam sebagian kehidupan masyarakat Madura ada kebanggaan tersendiri jika dapat merayakan pernikahan anak-anak mereka dengan mewah, itu tidak hanya berlaku pada masyarakat kelas atas, tapi juga masyarakat kelas menengah kebawah. Semakin besar dan mewah perayaan pernikahan yang dapat mereka laksanakan maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pada masyarakat lingkungannya.

Dengan demikian tradisi ini membawa dampak positif dalam masyarakat Madura, baik itu kalangan strata atas yang merasa terbantu dan lebih-lebih pada masyarakat kalangan menengah kebawah yang memang sangat membutuhkan bantuan dana untuk resepsi pernikahan.

Pada sisi yang lain, *atolong* merupakan hutang-piutang dalam jangka waktu yang tidak ditentukan kapan pengembaliannya, bisa dalam hitungan bulan bahkan tahun. Waktu pengembalian adalah ketika pihak yang memberi juga akan mengadakan perayaan pernikahan, maka pihak yang pernah diberi bantuan harus mengembalikan yang mereka terima dengan jumlah sama persis seperti yang mereka terima dulu bahkan ada yang dilebihkan. Memang tidak ada ijab qabul yang resmi tentang jumlah yang harus dikembalikan. Akan tetapi sudah menjadi tradisi masyarakat Madura untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama dengan yang pernah diterima. Jika sumbangan itu tidak dikembalikan pada pihak pemberi, maka dampak sanksi sosial kepada keluarga penerima yang tidak mengembalikan tersebut akan menjadi pergunjungan dan persepsi negatif

pula jumlah hutang mereka, sehingga akhirnya akan memperberat perekonomian keluarga.

Sisi tidak baiknya juga dalam tradisi ini adalah ketika orang tua mempelai (orang tua laki-laki yang merupakan tulang punggung keluarga) meninggal, maka seluruh hutang-piutang *atatolong* perayaan pernikahan mereka yang belum dilunasi akan menjadi tanggung jawab mempelai untuk mengembalikan, ada juga di beberapa daerah dibebankan kepada orang yang serumah dengan orang yang meninggal, tidak harus orang atau anak yang mendapatkan resepsi pernikahan. Itu tentu menjadi beban tersendiri bagi mereka yang baru memulai kehidupan berumah tangga dan langsung diwarisi dan dibebani hutang, apalagi jika mereka belum mempunyai pekerjaan yang mapan. Sebagaimana yang disampaikan oleh

A. Tajul Ulum berikut ini;

Yang agak repot itu kalau waktunya mendadak, sedangkan pihak yang diberi belum siap dananya untuk mengembalikan. Kebanyakan masalah ini menimpa keluarga yang kurang mampu. Sehingga pihak penerima akhirnya terpaksa berhutang pada orang lain lagi untuk dapat mengembalikan sumbangan yang pernah mereka terima. Semakin besar jumlah yang harus mereka kembalikan, maka akan besar pula jumlah hutang mereka, dan pastinya akan memperberat perekonomian keluarga. Sisi tidak baiknya juga dalam tradisi ini adalah ketika orang tua mempelai (orang tua laki-laki yang merupakan tulang punggung keluarga) meninggal, maka seluruh hutang-piutang *atatolong* perayaan pernikahan mereka yang belum dilunasi akan menjadi tanggung jawab mempelai untuk mengembalikan, ada juga di beberapa daerah dibebankan kepada orang yang serumah dengan orang yang meninggal, tidak harus orang atau anak yang mendapatkan resepsi pernikahan. Itu tentu menjadi beban tersendiri bagi mereka yang baru memulai kehidupan berumah tangga dan langsung diwarisi dan dibebani hutang, apalagi jika mereka belum mempunyai

tidak ditentukan besarnya, lazimnya membawa beras minimal satu sak yang ukuran 25 kg dan juga uang pada saat menghadiri acara pernikahan tersebut.

Praktik tersebut secara tidak langsung memberikan undangan sekaligus mengkonfirmasi kesanggupan untuk transaksi *atatalog*. Masyarakat sebenarnya memiliki hak untuk menolak undangan sebagai isyarat untuk tidak ikut dalam transaksi *atatalog*. Akan tetapi jika menolak, akan terjadi sanksi sosial di masyarakat.

Dalam tingkatan kemaslahatan, tradisi *atatalog* tergolong kebutuhan *hājiyyah* (sekunder) yakni kebutuhan-kebutuhan sekunder bila mana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut bisa termasuk sanksi sosial dari masyarakat, tidak mudah interaksi lagi dengan masyarakat, dan lain sebagainya.

Secara prinsip, transaksi ini kurang memenuhi syarat fikih, khususnya dari segi *ijab qabul*, yang paling tidak memenuhi tiga syarat yakni 1) harus jelas dan dipahami, 2) harus sesuai, dan 3) harus bersambung. Akan tetapi dapat kompromi dengan pendekatan '*urf*' sebagai hukum yang akomodatif. Islam mengakomodasi adat kebiasaan yang kemudian dalam disiplin ilmu keislaman dikenal dengan kata '*Urf*' sebagai salah satu metodologi dalam mengistinbatkan Hukum Islam.

Dalam Islam, transaksi utang piutang merupakan hal yang sifatnya *Jaiz* atau diperbolehkan, namun Islam mengatur tata cara utang piutang tersebut secara sistematis. Fluktuasi keadaan ekonomi terkadang memaksa seseorang untuk meminjam uang. Pengajuan pinjaman tersebut biasanya beragam, mulai dari lembaga keuangan resmi seperti perbankan atau pun yang berdimensi online. Namun, ada juga beberapa kalangan yang lebih memilih untuk meminjam pada sahabat dan saudara. Bukan tanpa alasan, pinjaman tersebut tentu tanpa bunga dan agunan apa pun. Dengan saling percaya, pinjaman tentu akan diberikan.

Islam sendiri telah mengatur adab pinjam meminjam. Dalam Islam, berhutang merupakan hal yang sifatnya *jaiz* (boleh). Berhutang memang bukan sebuah perbuatan dosa. Namun, aktivitas utang piutang yang tak terkendali akan mengarahkan orang tersebut kepada perbuatan munkar. Berdusta dan ingkar janji akan menjadi perbuatan sehari-hari bagi orang yang sudah terlilit hutang. Segala hal akan terlihat benar asalkan dapat menambah jumlah nominal hutangnya. Hutang hanyalah sebatas *emergency exit* saat kita sudah tidak lagi memiliki sumber pendapatan untuk bertahan hidup. Uang dari hasil hutang tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

Utang piutang dalam Islam sendiri bukanlah hal yang tercela jika dapat menggunakan dana dengan bijak, terlebih dalam kondisi darurat. Islam menyediakan alternatif berhutang dengan cara yang

walimah, serta ditutup dengan berbagai hiburan seperti seperti ketoprak rukun famili, orkes, *tandek* dan jenis hiburan lainnya.

2. Insider dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam tradisi *atolong*, sedangkan Outsider adalah masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam tradisi *atolong*, juga masyarakat selain warga Sumenep Madura.

Menurut insider, *Atolong* sangat membantu dalam pendanaan dan pengadaan barang dalam acara pernikahan, bahkan sesuatu yang pada awalnya terasa berat dan sulit, dengan tradisi ini acara resepsi pernikahan akan menjadi ringan dan mudah. Tradisi ini juga seakan menjadi tabungan bagi orang yang membantu yang suatu saat bisa diminta kembali. Demikian pula, menjadi wahana untuk mempererat tali silaturahmi antar sanak famili dan tetangga. Dan juga untuk menyaksikan bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami istri. Selain nilai positif tersebut, tradisi ini juga merupakan aktualisasi dari ajaran agama Islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong.

Menurut outsider, tradisi *atolong* menjadi beban psikologis tersendiri bagi masyarakat karena: *Pertama*, ada perasaan malu ketika tidak mampu untuk mengembalikan. *Kedua*, ada sanksi sosial ketika yang diberikan tidak sesuai dengan yang diterima. *Ketiga*, ada beban ekonomi.

3. Hukum Islam mengakui adat dan berlaku seterusnya. Menghapus atau menyatakan tidak berlaku adat, apabila bertentangan dengan ajaran

Islam. Secara keseluruhan hukum Islam berlaku untuk mengganti adat dengan pendekatan yang adaptif dan harmonis. Dalam tradisi *atatolong*, selain ada unsur tolong menolong dalam praktik tradisi, juga ada unsur ekonomi dalam hal pemberian bantuan berbentuk hutang.

Al-'urf merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari *al-'urf*. Perbedaan dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya. Sedangkan kata *al-'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *al-'urf* mengandung konotasi baik. Dan tradisi *atatolong* termasuk adat atau tradisi yang mengandung *al-'urf*.

Dari segi obyek, *atatolong* tergolong *Al-'Urf al-Lafzhi* atau *Qauli*. *Atatolong* secara lafadz adalah akad pemberian atau hibbah akan tetapi yang dimaksud adalah akad utang piutang dan sudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

Dari segi cakupan, *atatolong* tergolong *Al-'Urf al-Khas* yakni kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu seperti di daerah sumenep madura.

Dari segi keabsahan, *atatolong* tergolong *Al-'Urf al-Ṣahih* yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-sunnah, tidak

C. Keterbatasan Kajian

Sepanjang penelitian ini belum menghasilkan teori yang bersifat metodologi, yaitu sebuah teori yang dihasilkan dari uji hipotesis. Namun sebagai penelitian kualitatif-etnografik, penelitian ini telah menghasilkan teori substantif, yaitu teori yang dibangun di atas data empirik. Oleh karenanya proposisi-proposisi yang dihasilkannya baru memasuki tahapan sebagai hipotesis yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karenanya, hasil penelitian ini juga hanya berlaku dalam setting sosial yang diteliti.

Kemudian, penelitian ini tidak menjangkau terhadap persoalan dasar tentang variabel-variabel tradisi lokal *atolong* dan tradisi Islam lokal dan medan budaya apakah berhubungan langsung atau tidak. Sebab penelitian kualitatif-etnografis hanya memahami kaitan-kaitan tersebut tanpa berpretensi menguji hubungan antar variabel. Masih dimungkinkan penelitian yang lainnya untuk mengungkap lebih jauh hubungan antar variabel tersebut.

Konsentrasi penelitian ini lebih menekankan pada kajian tradisi lokal *atolong*. Dan sangat diperlukan penelitian lanjutan untuk mencoba mengkaji lebih jauh tentang tolong menolong dalam acara pernikahan.

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*, Cet. 1. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Asqalany (al), Ibnu Hajar. *Bulūqḥul Marām Min Adillah al-Ahkām*, Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah, 2008.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- ‘Asqallāni (al), Shihābuddin Abu al-Faḍl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. *Tadḥhib at-Tadḥhib*, India: Dāirah al-Ma’ārif an-Nizamiyah, 1325 H.
- Barth, Fredrik. *Kelompok Etnis dan Batasannya*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Bantani (al), Muhammad Nawawi. *Nihāyah al-Zayn*, Indonesia: Dār Ihta’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1999.
- Bayyah, Abdullah Bin. *Tanbih al-Marāji’ Ala Ta’sili Fiqh al-Waqi’, al-Taysir wa Tabsir* (versi PDF) www.binbayyah.net.
- Bayyah, Abdullah bin. *‘Alaqah Maqāsid al-Sharī’ah bi Usul al-Fiqh* London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2006.
- Barry (al), M. Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001.
- Bedner Adrian W, dkk, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan: Bali 2012.
- Berlianti, Yeni Salma. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bertens, K. *Panorama Filsafat Modern* Jakarta: Mizan, 2005.
- Burhanudin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta 2009.
- Bisri, Hasan. *Pilar-pilar Penulisan Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bouvier, Hélène. *Lèbur: Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Bawani, Imam. *Tradisionalisme dalam pendidikan Islam* Surabaya: Al-Ikhlās, 1990.
- Bakry, Sidi Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqih* Cet. IV. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Bukhari (al), Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. *Ṣahih Bukhari*, Beirut, Lebanon: Dār Al-Fikr Volume 19, 1998.
- Connolly (ed), Peter. *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Choiri, Yogyakarta: LKIS, 2012.
- Choir, Tholhatul, Ahwan Fanani, ed., *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I. 2009.
- Darsono dan Kawan-kawan, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016.
- Din (al), Izz Muhammad Khawajah, *Nazariyyah al-'Aqd fi al-'Aqd fi al-Fiqh al-Islami*. KSA: Majmuah Dallah al-Barokah, 1993.
- Dhuhli (al), Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Shaibani. *Musnad Ahmad*, Mesir: Dār al-Hadith Volume 16, 1998.
- E.E. Evans, Pritchard. *Theories of Primitive Religion*, Yogyakarta: PLP2M, 1984.
- Fuad, Mahsun. "Hukum Islam dan Sosial" *Jurnal al-Risalah* v.11, no. 2, 2011.
- _____. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* Yogyakarta: LKIS, 2005.
- Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Field, John. *Social Capital, Second Edition*. London And New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2000.
- Gemala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Ghazali, Dede Ahmad dan Heri Guynawan, *Studi Islam; Suatu Pengantar dengan Pendekatan Interdisipliner*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ghazali (al), *Mukāshafah al-Qulūb*, Indonesia: Al-Haromain, 1998.
- Ghufron, A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hamid, Abd. *Hutang Paléan: Studi terhadap Perilaku Masyarakat Desa Prancak Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep Madura*, Madura: STEI-MM Sumber Bungur, 2017.

- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hadiwijono, Harun. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta: Kanisius, 1980.
- Halim, Abdul . *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2004.
- Halabiy (al), Mushtafa Al-Babiy. *Al-Mu'āmalah al-Maddiyah wa al-Adabiyah*, terj. Mesir: Ali Fikri, 1998.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hasani, Ismail. *Naẓariyah al-Maqāṣid 'Inda al-Imām Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Ashūr*, Virginia: Al-Ma'had al-'Alāmi li al-Fikr al-Islāmī, 1995.
- Huub de Jonge. *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam: Suatu Studi Antropologi Ekonomi* Jakarta: PT. Gramedia, 1989.
- Husserl, Edmund. *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy*, Terjemahan T.E. Klein dan W.E. Pohl, Dordrecht: Kluwer, Boston Lancaster, Martinus Nijhoff Publisher, Third Book, 1983.
- Ismail Habib, Muhammad Bakr. *Maqāṣid al-Islāmiyah Ta'sīlan wa Taf'īlan*, Makkah: Dar al-Tībah al-Khadrā, 2006.
- Jistaniyah, Hanan Binti Muhammad Husen, *Aqsām al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami*. Saudi Arabia: Universitas Ummul Qura, 1999.
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penulisan Kualitatif* Bandung: Rosda Karya, 2006.
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Ahmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* Jakarta: Amzah, 2005.
- Jaziri (al), Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Madhahib al-Arba'ah* Juz 2, Beirut: Dar-Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- Kathir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kathir*, Libanon: Bairut, 1999.

- Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Kaelan, *Metode Penulisan Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010).
- Kawulich, Barbara. *Data Analisis Techniques in Qualitative Research*, Conference Paper January 2004, 2-19, <https://www.researchgate.net/publication/258110388>.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Maqāsid al-Sharī'ah Made Simple*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kharoufa, 'Ala' Eddine. *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2000.
- Kusumohardjojo, Budiono. *Perbandingan Hukum Kontrak*, Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Kaelan, *Metode Penulisan Agama Kualitatif Interdisipliner* Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Khafif (al), Ali. *Ahkam al-Mu'amalah al-Shar'iyah*, Saudi Arabiya: Dar al-Fikr al-'Araby, 1997.
- Kaylani (al), Abd Rahman Ibrahim. *Qawāid al-Maqāsid Inda al-Imam al-Shatibi* Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.
- Knott, Kim. *Insider/Outsider Perspectives dalam the Routledge Companion to the Study of religion*, Edited by John R. Hinnels, London: Routledge Taylor and Fancis Group, 2005.
- Malibari (al), Zainuddin. *Fath al-Mu'in*, Semarang: Thoha Putra, 1999.
- Maqdisi (al), Muwafiquddin Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Mardiasmo, *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2016.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqasid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Majah, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin., *Sunan Ibni Majah*, Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-'Ilmiyah Volume 2, 1999.

- Misno, Abdurrahman Bambang Prawiro, *Reception Through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- M. Rofiq, *Revitalisasi Peran Ushul Fiqih Sebagai Landasan Metodologis Istinbath Hukum Islam*, Kontekstualita, Jurnal Penulisan Sosial Keagamaan, Vol 22 No 2, Desember 2007.
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Hukum Islam, dalam Mencari Islam : Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, Amin Abdullah (Ed.) Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 2000.
- Maliki (al), Jalaluddin. *Qaul wa Amirah*, Mesir: Dār al-Ihya al-Kutub, 2001.
- Mahita Paksi, Tutut Ferdiana. *Refleksi Pendekatam Socio-Legal dalam Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslih, Mohammad. *Filsafat Ilmu* Yogyakarta: Belukar, 2004.
- Mulyadi. *Tradisi Ompangan dalam Perayaan Pernikahan (Potret Solidaritas dan Kebersamaan Masyarakat Madura)*, Sumenep: STKIP PGRI Sumenep, 2019.
- Misiak, Henry dan V.S Sexton. *Psikologi Fenomenologi, Eksistensial dan Humanistik* Bandung: Refika Aditama, 1988.
- Muslim, Abul Husain, bin al-Hajjaj al-Naisaburi. *Ṣaḥih Muslim*, Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyah Volume 3, 1997.
- Mujib, Fatekhul, Eko Ariwidodo, dan Mushollin. *Tradisi Oto’-Oto’; Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura Di Surabaya*, Pamekasan: STAIN PAMEKASAN, 2015.
- Musbikin, Imam. *Qawā’id Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Nawawy (al), Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. *Riyāḍ al-ṣālihīn*, Kairo: Dār al-Taufiq li al-Turats, 1998
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurmaningsih, *Urgensi Teori Kritik, Dalam Analisis Kajian Islam*, Makasar: Jurnal Ijtimaiya, Vol. 6, No. 1, Februari, 2013
- Nurdi, Ali dkk. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Akasara, 1996.
- Parmudi, Mochammad. *Dinamika Ekonomi Islam di Indonesia, Telaah sosio historis teologis, terhadap Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal at-Taqadum, , Vol. 8, No. 1, Juli 2016.
- Poerwanto, Hari. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Fi Fiqh al-Aulawiyat; Dirāsah Jadīdah fi Dau'i al-Quran wa Sunnah* Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Rahal, Ala' Din Husayn. *Ma'ālim wa Dawābit al-Ijtihad 'inda Syeikh al-Islam Ibnu Taimiyah*, Yordania: Dar Nafais, 2002.
- Rahem, Abd. *Tradisi Ter Ater di Desa Banjar Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur*, Jogjakarta: UIN SUNAN KALIJAGA, 2015.
- Rahman, Zainal Abidin dan Holilur. *Tradisi Bhubuwan sebagai Model Investasi di Madura*, Jakarta: UI, 2013.
- Rivai, Veithzal dan Arifiandy Permata Veithzal, dan Marissa Greace Haque F, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2011.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi. Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
- Raysuni, Ahmad. *Nazāriyyah al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Shātibi*, Beirut: al-Ma'had al- Alami li al-fikr al-islāmi, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam Bandung*: Sinar Baru Algensindo, 2005.

- Susan E, Rayner. *The Theory of Contract In Islamic Law*, London Graham and Trotman, 1991.
- Sedyawati, Edy. *Budaya Indonesia, Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Musthofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Shodiqin, Ali. *Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penulisan Hukum Islam*, Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, IAIN Purwokweto, Volume VII, No. 1 Januari 2013.
- Sarjono, Soekanto. dkk, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1988.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Jilid II 1999.
- Sucipto, Raharjo. *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi pengembangan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suyuṭi (al), Jalāluddin Abdur Rahman bin Abu Bakar al-Miṣri. *Al-Jāmi‘ Al-Ṣaghīr min Ahādith al-Bashīr al-Nadhīr*, Beirut, Lebanon: Dārul Kutub Al-‘Ilmiyah, 1999.
- _____ dan Jalāluddin Muhammad bin Ahmad Mahali, *Tafsīr Jalalain*, Indonesia: al-Haramain Jaya, Cet 6, 2008.
- Soetrisno, Eddy. *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ladang Pustaka dan Inti Media, 2010
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* Cet. 3., Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Salim, Kamal bin Al-Sayyid. *Fiqh Sunnah Wanita*, Jakarta: Tiga Pilar, 2007.
- Singarimbun, M. dan S. Effendi. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:LP3ES, 1987.

- Suprayoga, Imam Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, Teknik)*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih* Cet. III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. Lima Kaidah Pokok dalam Fiqih Mazdhab Syafi'i, Jalaluddin Abdurrahman, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Syani, Abdul. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Suparlan, Parsudi. *Interaksi Antar Etnis di Beberapa Provinsi di Indonesia*, Jakarta: Depdiknas Dirjen Kebudayaan, 1989.
- Thayar (al), Abdullah bin Muhammad dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Tirmidzi (al), Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa. *Sunan Tirmidzi*, Cet. 2. Mesir: Syarikah Maktabah, 2000.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- U. Maman, M. Deden Ridwan, M Ali Mustofa, dan Ahmad Gaus, *Metodologi Penulisan Agama Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Werdisastra, raden. *Babad Sumenep*, Universitas Michigan: Garoeda Buana Indah, 1996.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, California: University of California Press, 1978.
- Zulkarnaen, Iskandar. *Sejarah Sumenep*, Sumenep: Dinas Pariwisata dan kebudayaan kabupaten Sumenep, 2003.

